

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MADURA PASCA SURAMADU

Mohammad Kosim

(Penulis, dosen STAIN Pamekasan, Jl. Raya Panglegur Km. 04 Pamekasan.
Kontak person 081330603147, alamat, Belakang Perum Tlanakan Indah Pamekasan)

Abstrac

Suramadu bridge is like the dream comes true. Muderese must feel delighted since the problem of transportation is now resolved. On the other hand, the bridge arises a challenge, as Madura will be an open area with its consequences. Madurese people which have been marginalized by the nasional development agenda, seem are not ready to face a competing challenge. Therefore, the development of human resource of Madurese is urgently ruquired.

Kata-kata kunci

madura, suramadu bridge, education

Pendahuluan

Tanggal 10 Juni 2009 menjadi momen bersejarah bagi warga Madura, karena waktu tersebut dipilih Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk meresmikan Jembatan Suramadu, jembatan terpanjang di Indonesia (\pm 5.438 M.) yang menghubungkan Pulau Madura dan Pulau Jawa.

Sebagaimana diberitakan dalam beberapa media, proses pembangunan Jembatan Suramadu berlangsung sangat lama dan penuh liku. Berawal dari terbentuknya PT. DMP (Dhipa Madura Pradana) tahun 1989 yang dikomandani Mohammad Noer, sesepuh Madura dan mantan Gubernur Jawa Timur (1971-

1976). Lembaga ini telah melakukan beberapa kali studi kelayakan terkait pembangunan Jembatan Suramadu. Tahun 1990, upaya PT. DMP mendapat dukungan pemerintah melalui Keputusan Presiden RI Nomor 55/1990 tentang Pembangunan Jembatan Surabaya-Madura. Proses berikutnya menghadapi kendala tidak ringan, mulai dari problema pembebasan tanah, masalah anggaran, hingga "penolakan" dari ulama Madura yang tergabung dalam BASSRA (Badan Silaturahmi Ulama Pesantren se-Madura).¹ Dengan

¹Pada tahun 1994, ulama Madura yang tergabung dalam BASSRA "menolak" pembangunan Jembatan

demikian, jika dihitung sejak terbentuknya PT. DMP tahun 1989, berarti proses pembangunan Jembatan Suramadu membutuhkan waktu \pm 20 tahun. Waktu yang sangat lama untuk membangun jembatan sepanjang 5,5 km.

Antara Gembira dan Cemas

Peresmian Jembatan Suramadu mendapat sambutan hangat dan meriah dari warga Madura, karena jembatan yang telah lama diimpikan tersebut benar-benar menjadi kenyataan. Kehadiran jembatan tersebut akan menandai berakhirnya "penderitaan" panjang warga Madura setiap akan ke Surabaya (dan sebaliknya). Sebagaimana dimaklumi, sudah ratusan tahun lamanya warga Madura harus *ongghe-toron* kapal untuk menyebrang dari Kamal-Madura ke Ujung-Surabaya (dan sebaliknya). Aktivitas rutin itu sangat melelahkan, menyita waktu dan mengeluarkan tidak sedikit biaya (terutama bagi orang yang membawa mobil). Melalui jembatan yang pembangunannya menghabiskan anggaran sekitar 5 triliun rupiah tersebut, waktu tempuh penyeberangan hanya membutuhkan 10-15 Menit, jauh lebih cepat dan lebih nyaman daripada naik kapal *ferry* yang memerlukan waktu sekitar setengah hingga satu jam. Belum lagi kalau harus antre menunggu kapal bersandar, tentu semakin membosankan.

Sejak "bersatunya" daratan Madura dan Surabaya, segala urusan Madura-Surabaya yang menggunakan jasa transportasi menjadi lebih lancar, cepat,

dan murah. Karena itu, dengan beroperasinya Jembatan Suramadu, warga Madura patut bersyukur kepada Allah swt dan berterima kasih kepada pemerintah yang telah memfasilitasi pembangunan di Madura, meskipun terlambat.

Selain perasaan gembira dan senang pasca peresmian Jembatan Suramadu, sebagian warga Madura juga diliputi rasa cemas karena beberapa hal. *Pertama*, setelah Jembatan Suramadu beroperasi, jarak antara Surabaya (sebagai kota metropolitan) dan Madura (sebagai wilayah "terisolir") tidak ada lagi. Madura akan menjadi "Surabaya Utara". Apalagi wilayah Surabaya telah penuh sesak dengan bangunan dan kaum migran, maka pengembangan wilayah akan beralih ke kawasan Madura. Dengan menjadi "Surabaya", wajah Madura akan banyak berubah menyesuaikan dengan hiruk pikuk Surabaya sebagai kota metropolitan.

Sebagaimana dipahami, di antara implikasi negatif kota metropolitan² adalah berkembangnya pola hidup modern yang materialistik, hedonistik, individualistik, dan sekuler. Pola hidup demikian sebenarnya telah merasuk ke sebagian jiwa warga Madura, utamanya kalangan pemuda. Namun hal itu akan menjadi lebih "sempurna" jika Madura telah "menjadi Surabaya". Dengan demikian, bersatunya Madura dan Surabaya melalui Jembatan Suramadu, lambat laun akan menggeser tradisi Madura yang selama ini dikenal

Suramadu terutama jika pembangunan jembatan tersebut disatupaketkan dengan program industrialisasi. Alasannya, para kiai khawatir akan dampak negatif yang akan ditimbulkan. Tentang pro-kontra pembangunan Jembatan Suramadu, dapat dibaca dalam Muthmainnah, *Jembatan Suramadu: Respon Ulama terhadap Industrialisasi* (Yogyakarta: LKPSM, 1998).

²Di antara karakteristik kota metropolitan adalah kota yang berpenduduk lebih dari 1 juta jiwa, kehidupan sosial ekonomi berlangsung selama 24 jam dalam sehari dan melampaui batas administrasi, mobilitas penduduk dan penglaju (*commuter*) tinggi, serta didukung oleh prasarana dan sarana perkotaan yang memadai.

tradisional-religius menjadi modern-sekuler.

Kedua, perasaan cemas muncul karena setelah Jembatan Suramadu beroperasi lambat laun akan diikuti industrialisasi dengan beragam jenisnya, apalagi Pulau Madura sangat kaya akan sumber daya alam, misalnya garam, batu gamping, posphat, kalsit, tanah liat, minyak bumi dan gas alam.³ Mengapa cemas? Bukankah melalui industrialisasi akan diserap banyak tenaga kerja sehingga perekonomian warga semakin meningkat? Benar, industrialisasi di satu sisi memberi nilai positif. Berdirinya sejumlah industri, terutama jenis industri padat karya, akan menyerap banyak tenaga kerja sehingga akan mengurangi tingkat pengangguran. Demikian pula, dengan industrialisasi akan menggairahkan roda perekonomian warga sekitarnya.

Tapi di sisi lain, berkembangnya industrialisasi di Madura akan menjadi tantangan tidak ringan. Pendirian industri membutuhkan modal besar dan untuk mengelolanya diperlukan tenaga-tenaga terampil. Dalam beberapa kasus industrialisasi di suatu daerah menjadikan warga sekitarnya hanya sebagai penonton, paling *banter* hanya terlibat dalam penyediaan tenaga kasar dengan gaji rendah. Pada kasus demikian, mampukah warga Madura bersaing, baik sebagai pemilik modal maupun sebagai penyedia tenaga terampil? Selama ini warga Madura yang melakukan migrasi ke berbagai wilayah di Indonesia, termasuk ke luar negeri,

³Sekedar contoh, saat ini SPE Petroleum Ltd, perusahaan migas asal Cina yang memenangkan tender sebagai operator tunggal eksplorasi dan produksi migas di 70% daratan Madura, sedang melakukan eksplorasi besar-besaran atas sumber gas alam di Pulau Madura.

lebih banyak mengandalkan modal kekuatan fisik tanpa dibarengi keterampilan dan pendidikan memadai. Dengan pengalaman demikian, ketika industrialisasi “menjajah” Madura dikawatirkan warga Madura belum siap sehingga akan menjadi penonton, bahkan tontonan, di daerah sendiri.

Penjelasan tersebut mengindikasikan bahwa saat Jembatan Suramadu mulai beroperasi dan-lambat laun-diikuti industrialisasi, Madura akan menjadi wilayah terbuka. Aliran *modal-investasi, informasi, teknologi, gagasan, dan manusia* bisa dengan mudah keluar-masuk Madura. Akibatnya, Madura akan menjadi wilayah heterogen dalam beragam sisi kehidupan. Yang mencemaskan, sebagaimana kekawatiran Syukur Gazali, kemungkinan terjadi kooptasi budaya, budaya yang kuat (dari luar) akan mencaplok budaya yang lemah (di dalam).⁴ Dalam hal itu, budaya Madura yang tradisional-religius dikawatirkan akan tergerus oleh budaya luar yang sekuler dan materialistik.

Kondisi Umum SDM Madura

Penduduk Madura, dengan jumlah sekitar 4,2 juta jiwa, dari aspek pendidikan umum sangat jauh dari harapan. Sekitar 30% penduduk Madura tidak pernah mengenyam pendidikan, dan mayoritas penduduknya [69%] tidak lulus SD dan lulus SD.⁵ Dalam banyak kasus masih ditemukan penduduk

⁴Lihat A. Syukur Gazali, “Jangan Sampai Terjadi Akulturasi Budaya Madura”, *Jawa Pos*, 5 Pebruari 2009.

⁵Untuk kasus Pamekasan, misalnya, yang selama ini dikenal sebagai kota pelajar di Madura menunjukkan data sebagai berikut : 194.537 jiwa (33%) tidak tamat SD, 245.063 jiwa (42%) tamat SD, 81.282 jiwa (14%) tamat SMP, 52.094 jiwa (9%) tamat SMA/SMK, 5.483 jiwa (1%) tamat D1 dan D2, 2.771 jiwa (0,5%) tamat D3, 7.927 jiwa (1%), tamat S1, S2, S3. Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Tahun 2007.

Madura yang lebih mementingkan agar anak-anaknya bekerja untuk segera menghasilkan uang ketimbang harus menyelesaikan sekolahnya di SD/SMP.⁶ Demikian pula masih banyak penduduk Madura yang lebih mementingkan belajar ngaji al-Qur'an dan menulis Arab, dan "mengabaikan" pendidikan umum.⁷ Padahal untuk mengarungi hidup di dunia, pendidikan umum dengan beragam jenisnya sangat dibutuhkan.

Besarnya jumlah penduduk Madura tak terdidik disebabkan beberapa faktor, seperti ekonomi, sosial budaya, dan politik. Dari aspek politik, misalnya, keterbelakangan pendidikan di Madura disebabkan karena wilayah ini dalam waktu yang sangat lama, sejak masa Orde Lama hingga Orde Baru—bahkan sejak masa penjajahan--terpinggirkan dari agenda pembangunan nasional. Secara administratif Madura memang merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur, tapi kebijakan pembangunan di wilayah itu pada masa lalu hampir tak menyentuh empat kabupaten di Madura sebagaimana layaknya kabupaten lainnya. Karena kebijakan diskriminatif itu, Madura tertinggal dalam banyak aspek kehidupan, terutama dalam aspek pendidikan.

Sedangkan dari aspek ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan warga Madura karena pada umumnya penduduk di pulau ini berada dalam garis kemiskinan sehingga sulit

mengenyam pendidikan secara memadai. Perlu diketahui, tingkat kemiskinan di Madura masih tergolong tinggi. Pada tahun 2003, kemiskinan di wilayah ini mencapai angka 33,7 persen. Padahal pada tahun yang sama, tingkat kemiskinan di Jawa Timur rata-rata hanya 23 persen dan Indonesia 19 persen.⁸ Maka, dengan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi ditambah kesadaran masyarakat yang masih rendah akan pentingnya pendidikan, membuat warga Madura sangat tertinggal dalam pengembangan SDM.

Agenda ke Depan

Berdasar beberapa penjelasan di atas, maka di antara agenda besar yang harus diselesaikan di Madura pasca beroperasinya Jembatan Suramadu adalah menyiapkan SDM berkualitas. Upaya ini bisa dilakukan, antara lain, dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga Madura untuk mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Untuk itu, perlu disiapkan sarana-prasarana pendidikan memadai. Dengan perluasan partisipasi pendidikan, warga Madura akan semakin terdidik sehingga lebih siap menghadapi tantangan global yang penuh persaingan. Upaya lain yang perlu dilakukan adalah menyiapkan sumber daya terampil yang religius dan berakhlak mulia. Dengan sumber daya demikian, warga Madura diharapkan siap bersaing di dunia industri serta mampu membentengi diri dari sisi negatif industrialisasi dan kehidupan kota metropolitan.

⁶Beberapa kawan guru SD yang mengajar di daerah pedesaan dan terpencil menceritakan, umumnya siswa SD kelas 1 sampai 4 masih banyak, dan kian berkurang ketika mendekati ujian akhir kelas 6. Demikian pula beberapa guru SMP/MTs di pedesaan/pedalaman Madura menceritakan hal yang sama, kelas 1 hingga kelas 3 mesti berkurang hingga 30%-50%.

⁷Mohammad Amin, "Sulitnya Mengubah Kultur Fanatik Masyarakat: Sisi Lain Realitas Jagat Pendidikan di Madura", *Jawa Pos*, 2 Januari 2009.

⁸Baca Radar Madura, 29 April 2009, terutama dalam rubric "Bentuk Tim Ahli, Tentukan Arah Pengembangan Pembangunan Madura"

Modal Dasar

Selama ini orang luar melihat warga Madura sebagai penganut Islam fanatik. Dalam kenyataan, Madura dan Islam memang tak bisa dipisahkan. Sulit menemukan penduduk asli Madura yang tak beragama Islam.⁹ Pandangan itu akan segera mendapat pembenaran apabila berkunjung ke Madura. Di pulau yang oleh Kuntowijoyo disebut sebagai “pulau seribu pesantren”¹⁰ itu akan dengan mudah ditemukan *langgar*, pesantren dan madrasah—sebagai institusi pendidikan Islam—dengan jumlah ribuan mulai dari ujung barat Bangkalan sampai ujung timur Sumenep. Fenomena tersebut diperkuat dengan maraknya aktivitas keagamaan dan besarnya peran ulama dalam kehidupan masyarakat.

Besarnya peran ulama bagi warga Madura tercermin dalam falsafah orang Madura *bhupa'-babhu'-guru-rato*. Ungkapan itu mencerminkan hirarki penghormatan di kalangan masyarakat Madura. Ayah-ibu (*bhupa'-babhu'*) merupakan elemen utama dalam keluarga yang harus dihormati sebagai orang yang telah melahirkan dan mengasuh anak-anak-hingga dewasa. Sedangkan elemen utama dalam masyarakat yang harus dihormati adalah *guru* (lebih terfokus pada kiai), baru kemudian *rato* (pemerintah).

⁹Sulitnya menemukan suku asli Madura beragama non-Islam tidak hanya berlaku bagi suku Madura yang menetap di Madura, tapi juga bagi mereka yang merantau dan telah menetap di luar Madura. Hal itu diungkap oleh Ismani ketika meneliti kehidupan orang Madura perantau di Malang dan Jember. Lihat: Ismani, “Beberapa Aspek Kehidupan Orang Madura di Kota-Kota Perantauan”, dalam Samsuri, dkk, *Madura III (Kumpulan Makalah-Makalah Seminar 1979)*, Proyek Penelitian Madura dalam rangka Kerjasama Indonesia-Belanda untuk Pengembangan Studi, 1979, hlm. 346.

¹⁰Baca dalam Muthmainnah, *Jembatan Suramadu*, hlm. xi.

Pengaruh kiai melampaui batas pengaruh institusi-institusi kepemimpinan lainnya. Dalam berbagai urusan umat, kiai menjadi tempat mengadu, seperti dalam urusan agama, pengobatan, rizki, jodoh, pendirian rumah, bercocok tanam, konflik sosial, karier, politik, dan sejumlah problema hidup lainnya. Belum mantap rasanya apabila segala urusan tidak dikonsultasikan lebih dahulu kepada kiai dan belum mendapat restu darinya.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa dengan karakter Islam yang kuat dan ketundukan kepada tokoh agama, warga Madura memiliki modal dasar--terutama dari sisi moral--untuk membentengi diri dari pengaruh negatif hiruk pikuk industrialisasi dan eksekusi dari gaya hidup kota metropolitan. Tergantung bagaimana modal dasar tersebut dikembangkan sehingga ajaran agama tetap bermakna dan dirasakan manfaatnya di tengah arus modernisasi. Tentu menjadi tugas berat para pemuka agama.

Menunggu Kiprah Elite

Banyak pihak yang mestinya terlibat langsung dalam upaya membangun Madura pasca Jembatan Suramadu, yaitu Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) yang dibentuk berdasar Peraturan Presiden Nomor 27/2008;¹¹ pemerintah empat kabupaten di Madura;

¹¹Tugas utama BPWS adalah merumuskan dan melaksanakan Program Percepatan Pembangunan Madura dengan skala prioritas pada 14 bidang sosial budaya Tahun 2009-2012 yang dibagi dalam dua tahap. Keberadaan BPWS pada awalnya sempat mendapat penolakan keras dari sebagian elite Madura karena pembentukan lembaga ini, sejak perencanaan hingga pengurus terbentuk, tidak melibatkan para tokoh Madura pada posisi penting, padahal lembaga ini dibentuk untuk mempercepat pembangunan di wilayah Madura.

perguruan tinggi, ulama, serta para tokoh dan pengusaha Madura.

Tanggal 31 Oktober 2009 lalu, bertempat di pendopo Kabupaten Bangkalan, para elite tersebut bertemu dalam sebuah acara Seminar Nasional bertajuk *Bersama Membangun Madura*. Melalui forum tersebut, mereka menyatukan tekad membangun Madura. Sebelumnya, tahun 2006, para bupati dan ulama se Madura juga pernah melakukan pertemuan serupa di Kabupaten Sampang dan menghasilkan kesepakatan untuk mengukuhkan Madura sebagai "Serambi Madinah."¹² Kesepakatan itu tampaknya lebih sebagai gerakan moral dalam rangka membentengi Madura dari akses negatif globalisasi dan industrialisasi pada era pemanfaatan Jembatan Suramadu.

Pertemuan-pertemuan sejenis itu memang perlu terus dilakukan untuk menyatukan langkah dan memantapkan program dalam membangun Madura. Sebab pembangunan di wilayah yang luasnya mencapai 5.283 km² tersebut tidak bisa dilakukan secara parsial dan terpisah.¹³ Para elite harus duduk bersama untuk melakukan perencanaan terpadu dan berkelanjutan dalam rangka membangun Madura ke arah yang lebih baik, dengan harapan bisa "memroteksi" budaya Madura agar tidak semakin

tergerus oleh budaya luar, dan bisa mengantar warga Madura agar tidak sekedar menjadi penonton, bahkan tontonan dan ditonton, di daerahnya sendiri.

Penutup

Tampaknya, di antara kendala besar yang dihadapi dalam membangun Madura adalah masalah anggaran. Edi Purwanto, Ketua BPWS, di hadapan peserta seminar *Bersama Membangun Madura* menyatakan bahwa lembaganya belum bisa merealisasikan program kerja karena anggarannya tidak ada. Ada kesan, perhatian pemerintah pusat cukup hanya sampai di Jembatan Suramadu.¹⁴

Jika informasi tersebut benar, tentu akan sulit membangun Madura. Padahal yang seharusnya diupayakan adalah melakukan percepatan (akselerasi) pembangunan di Madura untuk mengatasi ketertinggalan mengingat wilayah tersebut telah lama terpinggirkan dari agenda pembangunan nasional. Untuk melakukan akselerasi, perlu anggaran besar. Mengandalkan anggaran empat kabupaten di Madura tidak mungkin. Karena itu, yang dibutuhkan adalah perhatian lebih dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Bahkan Moh. Mahfudz, MD,¹⁵ tokoh Madura yang juga Ketua Mahkamah Konstitusi, mengusulkan perlunya *discriminative action* (perlakuan khusus) untuk mempercepat pembangunan Madura. Kebijakan diskriminatif itu penting dilakukan mengingat wilayah ini sudah sangat lama tidak mendapat perhatian sewajarnya dari pemerintah pusat, padahal perannya tidak kecil

¹²Slogan "Serambi Madinah" tidak hanya diklaim sebagai karakter Pulau Madura. Beberapa wilayah telah pula mengklaim daerahnya sebagai Serambi Madinah, seperti Padang, Banjarmasin, Banten, dan Gorontalo. Slogan tersebut diilhami oleh keberhasilan Rasulullah SAW membangun kota *Madinah al-Munawwarah*, kota berperadaban tinggi yang masyarakatnya heterogen, hidup beradab, berkesopanan, dan teratur dengan hukum-hukum yang ditaati oleh semua warga, hidup dalam jiwa persaudaraan (*ukhuwah*) di antara semua anggota masyarakat.

¹³Luas wilayah Madura, 5.283 km², terbagi atas empat kabupaten, yaitu Sampang (1.233,02 km²), Pamekasan (792,30 km²), Sumenep (1.998,54 km²), dan Bangkalan (1.260,14 km²).

¹⁴Baca lebih lanjut dalam "Terkendala Usulan Anggaran" dalam *Radar Madura* 1 Nopember 2009.

¹⁵Baca lebih lanjut dalam "Perlu Perlakuan Khusus" dalam *Radar Madura* 1 Nopember 2009.

untuk kemajuan negara tercinta ini. Ia mencontohkan bahwa perlakuan khusus tersebut pernah dilakukan pemerintah Amerika Serikat, ketika negara itu hendak menyetarakan hak warga-negaranya yang berkulit hitam.

Saat itu, pemerintah Amerika memberikan ke-istimewaan kepada warga kulit hitam untuk disediakan bangku di sekolah-sekolah. Sebab kalau

tidak begitu mereka tidak bisa sekolah. Hal yang sama juga pernah dilakukan konstitusi Indonesia terhadap hak politik perempuan. Mereka mendapat jatah 30% kursi di parlemen tanpa perlu bertarung, jika tidak begitu, perempuan akan sulit terpilih. Nah, untuk akselerasi pembangunan Madura, kenapa upaya itu tidak dilakukan?. *Wa Allāh a'lam bi al-sawāb*□

